

**UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMAKMURAN DAN OPINI
AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten
dan Kota di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2017-2020)**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh :

MAYANG DEWI PURGIYANTI

B 200 180 349

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMAKMURAN DAN OPINI
AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten
dan Kota di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2017-2020)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh :

MAYANG DEWI PURGIYANTI

B 200 180 349

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing



Heppy Purbasari S.E., M.M., Akt., C.A

HALAMAN PENGESAHAN

**UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMAKMURAN DAN OPINI
AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten
dan Kota di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2017-2020)**

**OLEH
MAYANG DEWI PURGIYANTI
B200180349**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
pada hari Selasa, 14 Februari 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat**

Dewan Penguji :

- 1. Heppy Purbasari S.E., M.M., Akt., C.A
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Dr. Fatchan Achyani, S.E., M.Si
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Drs. Atwal Arifin, Akt., M.Si
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



**Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E, M.Si
NIDN: 0616087401**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Februari 2023

Penulis



MAYANG DEWI PURGIYANTI

B200180349

**UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMAKMURAN DAN OPINI
AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten
dan Kota di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2017-2020)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, dan opini audit terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sumber data sekunder berupa LHP. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali tahun 2017-2020. Sampel penelitian berupa LRA pada 88 kabupaten dan 29 kota di Pulau Jawa dan Bali. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dengan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 432. Variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah, kemakmuran dan opini audit. Ukuran pemerintah daerah diukur menggunakan Lean total aset, kemakmuran menggunakan laju pertumbuhan PAD, dan opini audit menggunakan rasio nominal. Variabel dependen yaitu kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan rasio desentralisasi fiskal. Alat analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan aplikasi program SPSS Versi 25. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Pulau Jawa dan Bali tahun 2017-2020, sedangkan opini audit dan kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah di Pulau Jawa dan Bali tahun 2017-2020.

Kata kunci : Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Opini Audit, Kinerja Keuangan Daerah

Abstract

This study aims to determine the effect of local government size, affluence, and audit opinions on the financial performance of regencies and cities in Java and Bali in 2017-2020. This study uses a type of quantitative research. Secondary data source in the form of LHP. The population in this study is all district and city local governments on the islands of Java and Bali in 2017-2020. The research sample was in the form of LRA in 88 regencies and 29 cities in Java and Bali. The sampling method used was purposive sampling with a total sample of 432. The independent variables were government size, affluence and audit opinion. Government size is measured using Lean total assets, prosperity using the PAD growth rate, and audit opinion using nominal ratios. The dependent variable is regional financial performance as measured using the fiscal decentralization ratio. The data analysis tool uses multiple linear regression analysis and the application of the SPSS Version 25 program. The conclusion in this study is that the size of local government has an impact on regional financial performance in Java and Bali in 2017-2020, while audit opinion and prosperity has no effect on regional financial performance in Java and Bali Islands in 2017-2020.

Keywords: Size of Local Government, Prosperity, Audit Opinion, Regional Financial Performa

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang dan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat (Ernawati, 2017). Hal ini sesuai dengan peraturan

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan otonomi daerah yang menyatakan bahwa Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, menetapkan kebijakan sendiri, serta melakukan pembiayaan dan tanggung jawab keuangannya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah, setiap daerah dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat (Puspitasari, 2017). Jadi adanya otonomi daerah diharapkan meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah yang kemudian berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah (Harjito dkk, 2020).

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan, baik oleh individu maupun organisasi (Harjito dkk, 2020). Dalam lingkup kinerja pemerintahan, Kinerja keuangan daerah adalah suatu tingkat pencapaian dari hasil pengelolaan dalam bidang keuangan yang terdiri atas penerimaan dan belanja daerah yang menggunakan sistem keuangan yang sudah ditetapkan melalui perundang-undangan maupun kebijakan daerah (Sains, 2018). Pengukuran Kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk membantu evaluasi kinerja pemerintah daerah, mengalokasikan sumber daya dan pengambilan keputusan, memperbaiki komunikasi antarlembaga dan memaksimalkan pertanggungjawaban publik (Saragih dan Siregar, 2021).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang akuntabel dan berstandar umum (Masdiantini dan Erawati, 2016). Menurut Kemenkeu RI, Bentuk dari laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran (LPA), Laporan Finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). LPA terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Sedangkan laporan finansial terdiri atas Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (silky, 2012). Terdapat tuntutan yang besar dari masyarakat untuk dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas sektor publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2009). Cara agar terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu disampaikannya laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Ulfah, 2018). Penulisan laporan keuangan yang berstandar umum telah diatur dalam peraturan Undang-Undang No 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Undang-Undang No. 64 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akural pada pemerintah daerah. Untuk memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan harus diperiksa guna menilai tingkat kewajaran dari laporan keuangan yang berstandar umum oleh auditor independen atau disebut dengan Badan Pemeriksa keuangan (BPK).

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu tingkat pencapaian dari hasil kinerja keuangan dari bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui kebijakan atau perundang-undangan selama satu periode anggaran (Susanto, 2019). Kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana laporan LRA merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama disajikan tepat waktu yaitu selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (Yulitiawati dkk, 2020). Kinerja keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari efektifitas dalam menggali potensi daerah, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang lebih rendah dan porsi penerimaan PAD yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah (Zulkarnain, 2020). PAD merupakan sumber pendapatan daerah utama yang berkontribusi terhadap kinerja keuangan daerah (Zukhri, 2020). Semakin besar jumlah PAD yang dimiliki maka semakin kecil kemungkinan suatu daerah bergantung kepada pemerintah pusat (Sari dkk, 2020). Pengukuran kinerja dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah (Marliani, 2022). Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan umum dapat dijadikan sebagai evaluasi dan pemulihan kinerja dengan membandingkan skema dan pelaksanaannya (Saragih & Siregar, 2020). Salah satu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu menggunakan analisis rasio kinerja keuangan (Rizqi, 2020). Analisis rasio keuangan merupakan angka yang dihasilkan dari perbandingan antar pos-pos keuangan di dalam laporan keuangan (Awani & Hariani, 2021). Analisis rasio keuangan dapat diukur menggunakan rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan, dan derajat ketergantungan (Zukhri, 2020).

Rasio desentralisasi fiskal merupakan ukuran yang merujuk pada tingkat wewenang dan tanggung jawab yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pembangunan (Mulana & Rhea, 2019). Rasio desentralisasi fiskal dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah dari segi finansial (Halim, 2020). Rasio desentralisasi dihitung melalui perbandingan antara jumlah PAD terhadap total pendapatan daerah (Mahmudi, 2019). Rasio desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, dimana semakin tinggi kontribusi PAD maka kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi semakin baik (Wulandari, 2017). Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam artikel terkait UU HKPD terkait Re-Design Desentralisasi Fiskal menyatakan bahwa sebagai upaya mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal ditengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 tahun 2020 maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (HKPD) sebagai upaya mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa meningkatkan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi PAD dan *redesign* pengelolaan transfer ke daerah.

Hasil pemeriksaan BPK atas PAD kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 menyatakan bahwa realisasi PAD mengalami penurunan 5,23% dan realisasi dana transfer mengalami kenaikan sebesar 2,66% dari tahun 2019 dengan presentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 53,83% dibandingkan dengan presentase penerimaan transfer daerah sebesar 64,08%. Menurut Kajian Fiskal Regional Provinsi Banten tahun 2020 menyatakan bahwa ketergantungan pembiayaan belanja daerah terhadap penerimaan pusat masih tinggi dengan kontribusi pendapatan transfer daerah terhadap penerimaan daerah lebih tinggi dibanding dengan kontribusi PAD masing-masing sebesar 51,80%, dan 43,88%. Menurut Kajian Fiskal Regional Bali tahun 2020, realisasi PAD kabupaten dan kota di Provinsi Bali tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 37,4% dibandingkan tahun 2019 serta realisasi dana transfer daerah sebesar 83,76% dari pagu. Kontribusi PAD sebesar 36,33% dan dana transfer 61,08% terhadap total pendapatan daerah Bali.

Menurut Vebiani (2020) dan Zulkarnain (2020) Tingkat desentralisasi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2020 tergolong “Kurang” dimana sejumlah 17 Kabupaten/kota (62,96%) memiliki persentase rasio desentralisasi dibawah 20% yang berarti desentralisasi fiskal masih “Kurang”. Kemudian, menurut Rizky (2020) menyatakan tingkat rasio desentralisasi fiskal Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020 tergolong “kurang” belum merata dan masih tergolong rendah dimana tingkat desentralisasi tertinggi diperoleh dari Kota Semarang dan tingkat desentralisasi fiskal terendah diperoleh dari Kabupaten Blora. Sama halnya dengan desentralisasi fiskal pada kabupaten dan kota di Provinsi Bali tahun 2020 dengan perolehan tingkat desentralisasi tertinggi oleh Kabupaten Karangasem dan tingkat terendah berasal dari Kabupaten Buleleng (Fajria dkk, 2020). Menurut Andayani (2020) menyatakan bahwa tingkat desentralisasi di Provinsi Jawa Timur masih mengalami masalah yang terdapat pada rendahnya kualitas pemerintahan dan tingginya angka pengangguran. Penyebab Rasio desentralisasi yang rendah berasal dari kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang masih kurang (Fajria dkk, 2020). Tingkat desentralisasi menggambarkan besarnya kontribusi pemerintah pusat dalam membantu pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (Rizqi, 2020). Semakin tinggi tingkat kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi fiskal (Mahmudi, 2017:233).

Penelitian yang dilakukan oleh Suseno (2013); Rahayu (2015); Muryawan dan Sukarsa (2016); dan Hendri dkk (2020) menyatakan desentralisasi berpengaruh terhadap tingkat kinerja keuangan daerah. Menurut Setyaningrum & Hariyanto (2020) desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dikarenakan desentralisasi dapat menggambarkan keterlibatan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Menurut Suseno (2013) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kinerja dikarenakan semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi

kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Selanjutnya menurut Rahayu (2015) menyatakan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan meskipun masih rendahnya tingkat desentralisasi fiskal dan masih menunjukkan pola hubungan instruktif, akan tetapi desentralisasi fiskal yang rendah dapat dikategorikan tepat sasaran, karena melalui pelimpahan wewenang fiskal menjadikan pemerintah mampu melakukan pengelolaan keuangan meskipun belum terjadi kemandirian keuangan daerah sepenuhnya. Kemudian menurut Muryawan dan Sukarsa (2016) menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal maka kinerja keuangan daerah menjadi meningkat karena daerah dapat mengelola dan menggali sumber keuangan daerah secara mandiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Halim (2020) desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan dikarenakan dengan adanya desentralisasi fiskal menjadikan daerah memiliki wewenang luas namun jika pengelolaan oleh pemerintah daerah cenderung kurang baik dan tidak efektif, hal tersebut akan merugikan masyarakat dan daerah. Serta menurut Hendri, dkk (2020) menyatakan pengaruh penerimaan bantuan dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan masih mendominasi sumber penerimaan daerah dibandingkan dengan sumber penerimaan yang berasal dari PAD.

Pada penelitian terdahulu menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap hasil yang diberikan, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali dengan mengacu pada penelitian dari Masdianti dan Erawati (2016) dengan mengeliminasi 2 variabel yaitu *intergovernmental revenue* dan temuan audit dikarenakan variabel tersebut terlalu majemuk dan jenuh serta memfokuskan pengukuran kinerja keuangan daerah hanya pada rasio desentralisasi fiskal saja. Pada penelitian terdahulu yaitu penelitian Masdianti, dkk (2016), Aulia, dkk (2020), dan Millenia (2022) hanya meneliti pada suatu daerah regional saja dan tahun penelitian yang kurang Panjang yaitu 2-3 tahun saja. Maka peneliti memperluas cangkupan penelitian yaitu meliputi daerah Jawa (Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah) dan Bali dengan tahun penelitian 2017-2020. Alasan dari penambahan cakupan penelitian karena wilayah kepulauan Jawa dan Bali merupakan wilayah yang memiliki kekayaan berupa sumber daya alam dan manusia yang berlimpah. Menurut Drastina dan Himmati (2021) wilayah jawa timur memiliki keragaman sumber daya berupa pertambangan, pertanian, kehutanan dan kelautan. Jawa Barat memiliki sumber daya alam yang berlimpah, objek wisata yang memadai, dan industri—industri yang tersebar diberbagai kabupaten/kota (Zulkarnain, 2020). Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan sektor perekonomian yang berlimpah dan terus berkembang dengan adanya pembangunan-pembangunan infrastruktur daerah (Laksmi Dewi, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Ukuran Pemerintah Daerah, kemakmuran Dan Opini audit Terhadap Tingkat

Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2017-2020)''.

2. METODE

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa angka-angka yang dapat diukur dengan satuan hitung (Sugiyono, 2009:23). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI. Variabel ukuran pemerintah daerah diperoleh dari Lean total aset di laporan neraca, variabel kemakmuran diperoleh dari laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari LRA, variabel opini audit diperoleh dari LHP BPK RI dan kinerja keuangan daerah diukur menggunakan pembagian PAD dan pendapatan daerah dari LRA. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini dipilih atas pertimbangan bahwa data yang berasal dari situs resmi ini mempunyai validasi data yang terjamin oleh pihak berwenang sehingga data tersebut bersifat handal untuk mendukung penelitian (Andriyani, 2018). Teknik analisis data secara deskriptif yaitu teknik analisis data dengan menggambarkan data yang terkumpul sesuai dengan nilai data penelitian yang tertulis tanpa bermaksud mengeneralisasikan hasil penelitian. Teknik analisis data deskriptif diantaranya penyajian data baik dalam bentuk tabel, grafik, diagram, presentase. Frekuensi, mean, median, dan modus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Regrsi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa Variabel Independen terhadap Variabel Dependen yang bertujuan untuk mengukur hubungan antara Variabel Dependen dengan Variabel Independen (Ghozali, 2013).

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linier

Coefficientsa					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-254,378	21,519		-11,821	0,000
X1 UKURANPEMERINTAH AN	9,018	0,629	0,570	14,343	0,000
X2 KEMAKMURAN	0,052	0,022	0,094	2,344	0,020
X3 OPINIAUDIT	3,373	2,822	0,048	1,195	0,233

Dari hasil tabel 1 diatas apabila dituliskan dalam bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$KK = a + \beta_1 UD + \beta_2 KD + \beta_3 OA + e \quad (1)$$

$$KK = 254,378+ 9,018 (UD) + 0,052 (KD) + 3,373 (OA)+ 21,519 (e) \quad (2)$$

Pengaruh regresi linier diatas menunjukkan arah dari masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien regresi dari variabel dependen yang memiliki tanda positif artinya bahwa adanya pengaruh searah terhadap variabel dependen. Sedangkan jika koefisien regresi dari variabel dependen yang memiliki tanda negatif artinya pengaruh yang berlawanan arah terhadap variabel dependen. Berdasarkan persamaan analisis regresi linier berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai koefisien variabel ukuran pemerintah daerah bernilai positif sebesar 9,018 menunjukkan bahwa apabila ukuran pemerintah daerah meningkat sebesar satu persen menyebabkan peningkatan kinerja keuangan daerah sebesar 9,018% dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan. Nilai koefisien variabel kemakmuran bernilai positif sebesar 0,052 menunjukkan bahwa apabila kemakmuran meningkat sebesar satu persen menyebabkan peningkatan kinerja keuangan daerah sebesar 0,052% dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan. Nilai koefisien variabel opini audit bernilai positif 3,373 menunjukkan bahwa apabila opini audit meningkat sebesar satu persen menyebabkan peningkatan kinerja keuangan daerah sebesar 3,373% dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan.

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerapkan variabel independen (Ghozali, 2018). Pada pengujian hipotesis dapat dikatakan signifikan ketika nilai $t\text{-Statistic} > 1,96$ apabila nilai $t\text{-Statistic} < 1,96$ maka dianggap tidak signifikan (Ghozali, 2016). Uji t adalah menguji koefisien regresi secara individual yang menggunakan *Significance Level* 0,05 ($\alpha=0,05$). Hasil uji t dijelaskan pada tabel 1.

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa, Ukuran pemerintah daerah memiliki nilai $t = 14,343$ ($t^{(tabel)} 1,969 > t^{(hitung)} 14,343$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Berarti H1 **diterima**, Hasil ini membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Kemakmuran memiliki nilai $t = 2,344$ ($t^{(tabel)} 1,969 < t^{(hitung)} 2,344$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,020 lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Berarti H2 **ditolak**, Hasil ini membuktikan bahwa kemakmuran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Opini audit memiliki nilai $t = 1,195$ ($t^{(tabel)} 1,969 > t^{(hitung)} 1,195$) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,233 lebih besar dari 0,05 ($\alpha=5\%$). Berarti H3 **ditolak**, Hasil ini membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Dalam hal ini variabel independen diantaranya ukuran pemerintah daerah, kemakmuran dan opini audit terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil uji determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan tabel diatas, didapati hasil *Adjusted R Square* sebesar 0,323 yang berarti terdapat hubungan lemah antara ukuran pemerintah daerah, kemakmuran dan opini audit terhadap kinerja keuangan daerah karena nilai determinasi dari variabel independen

dalam penelitian ini yaitu sebesar 32,3% sedangkan 67,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model regresi ini. Faktor lain diantaranya yaitu Pendapatan transfer dari pusat, belanja modal, *intergovernmental revenue*, karakteristik pemerintahan, *leverage*, DAU, DAK, dan faktor yang berpengaruh lainnya.

3.2 Pembahasan

3.2.1 H1 : Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan daerah

Ukuran pemerintah daerah diukur menggunakan total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. berdasarkan hasil pengolahan data penelitian, ukuran pemerintah daerah menggunakan total aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali tahun 2017-2020. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran menggunakan uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti H1 **diterima**. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa semakin besar jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Bali maka semakin tinggi kinerja keuangan daerah di Pulau Jawa dan Bali pada tahun 2017-2020. Hal ini karena besarnya total aset yang dimiliki daerah mencerminkan besarnya jumlah PAD dan pendapatan daerah. Semakin besar jumlah total aset yang dimiliki suatu pemerintah daerah maka akan mempermudah jalannya suatu pemerintahan daerah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan kemudian akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah di Pulau Jawa dan Bali pada tahun 2017-2020

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sumarjo (2010), Kusumawardani (2012), Aziz (2015), Alviani (2018), Ahmad dkk (2017), Aulia dan Rahmawati (2020), Utomo (2015), dan Rafika (2020) menyimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Sama halnya penelitian oleh Ahmad dkk (2017) Semakin besar ukuran pemerintah daerah dengan indikasi peningkatan jumlah total aset maka semakin tinggi atau baik kinerja keuangan daerah tersebut. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sumarjo (2010) semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Hasil penelitian ini didukung oleh pernyataan Aulia dan Rahmawati (2020) Total aset yang dimiliki suatu daerah dapat memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam kegiatan operasional daerah untuk memenuhi kewajiban yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana semakin baik tingkat pelayanan kepada masyarakat maka akan mencerminkan kinerja keuangan daerah yang baik pula. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Sumarjo (2010) pelayanan yang baik dapat diberikan oleh pemerintah daerah jika didukung dengan aset yang baik. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk dapat memberikan pelayanan masyarakat yang maksimal guna meningkatkan kinerja keuangan daerah.

3.2.2 H2 : Kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Kemakmuran merupakan potensi yang harus dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan. Hasil pengolahan data kemakmuran dengan mengukur total PADt dikurangi dengan PAD t-1 dibagi PAD t-1 menyatakan bahwa kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali tahun 2017-2020. Hal ini dapat dilihat dari uji t yang menyatakan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,020 lebih besar dari 0,05 yang berarti H2 **ditolak**. Meskipun H2 ditolak, namun diperoleh nilai t positif 2,344 dimana berarti bahwa kemakmuran difokuskan dengan laju PAD berpengaruh positif. Namun, pengaruhnya tidak signifikan. Pemerintah daerah kabupaten dan kota di pulau jawa dan bali pada tahun 2017-2020 masih tergantung terhadap pemerintah pusat dan cenderung tidak memanfaatkan PAD sebagai sumber kegiatan pemerintah daerah. Menurut Satria dan Sari (2018) menyatakan bahwa suatu daerah belum mampu memenuhi belanja daerah yang sangat besar dikarenakan total PAD yang relatif kecil dibandingkan dengan total pengeluaran belanja daerah yang relatif besar setiap tahunnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Satria dan Sari (2018), Sumarjo (2010), dan Minarsih (2015) menyatakan tingkat kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Menurut Sumarjo (2010) yang menyatakan peran pemerintah PAD terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Meskipun menurut Kusuma dan Handayani (2017) menyatakan bahwa dengan adanya peningkatan kemakmuran daerah dan kualitas pelayanan masyarakat maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah yang baik.

Penelitian ini didukung oleh Aulia (2020) menyatakan hubungan kemakmuran terhadap kinerja keuangan dilihat dari keberhasilan pemanfaatan PAD, meskipun hasil penelitian berpengaruh negatif dikarenakan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan kecenderungan pemerintah daerah tidak memanfaatkan PAD sebagai sumber kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan pemerintah daerah.

Kemudian menurut Masdianti dan Erawati (2016) yang menyatakan bahwa kemakmuran diukur menggunakan laju pertumbuhan PAD yang mengukur seberapa besar kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan penerimaan PAD dari tahun ketahun. Dengan diketahui pertumbuhan dari sumber penerimaan PAD, maka dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali tahun 2017-2020 dapat membiayai dan mencukupi kegiatan pemerintahan daerahnya sendiri.

3.2.3 H3 : Opini audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pengolahan data, opini audit pada pemerintahan daerah di kabupaten dan kota di Pulau Jawa Tahun 2017-2020 diukur menggunakan variabel *dummy* dengan 4 kategori menurut Heppy

Purbasari yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bernilai 4, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bernilai 3, Tidak Memberikan Pendapat (TMT) bernilai 2, dan Tidak Wajar (TW) bernilai 1, tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dari hasil pengujian diperoleh uji t dengan nilai signifikansi sebesar 0,233 lebih besar dari 0,05 yang berarti H3 **ditolak**. Hasil pengukuran auditor berupa Opini audit didasarkan atas beberapa aspek seperti kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pertimbangan pengendalian intern daerah, ketepatan kebijakan akuntansi daerah, lama proses auditing, auditor hanya mengambil beberapa sampel penelitian saja, dan aspek pemeriksaan lainnya. Semakin baik opini audit yang didapati suatu daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kinerja keuangan daerah khususnya pemerintah daerah di Pulau Jawa dan Bali pada tahun 2017-2020.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Marfiana dan Kurniasih (2013), Muflihatin (2016), Ditasari & Sudrajat (2020), Pratama dkk (2022), dan Ditasari dkk (2022) menyatakan opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Menurut penelitin dari Ditasari dkk (2022) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dikarenakan opini audit tidak hanya menilai tata kelola keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, apakah laporan tersebut dibuat sewajarnya sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak.

Hasil penelitian ini didukung oleh pernyataan Marfiana dan Kurniasih (2013) opini audit yang baik tidak menjadi jaminan bagusnya kinerja keuangan daerah karena opini audit hanya diberikan oleh BPK yang tidak hanya menilai tata kelola dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tetapi juga menilai kewajaran laporan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Muflihatin (2016) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dikarenakan opini audit tidak hanya menilai tata kelola keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintahan, laporan tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, proses auditing yang dilakukan hanya mengambil beberapa sampel data bukan secara keseluruhan yang diperiksa dikarenakan keterbatasan waktu.

4. PENUTUP

Setelah mengetahui permasalahan, meneliti, dan membahas hasil penelitian tentang ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, dan opini audit terhadap kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah di kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali tahun 2017-2020. Maka peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Adapun simpulan yang dapat diambil terkait penelitian adalah sebagai berikut, H1 **diterima**, dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikan sebesar $0,00 < 0,05$. Variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal

ini berarti bahwa besarnya ukuran pemerintah daerah yang diukur dari total aset yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali tahun 2017-2020 berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali tahun 2017-2020. H2 **ditolak**, dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikan sebesar $0,20 > 0,05$. Variabel kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan diketahui pertumbuhan dari sumber penerimaan PAD, maka dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali tahun 2017-2020 dapat membiayai dan mencukupi kegiatan pemerintahan daerahnya sendiri. H2 **ditolak**, dilihat dari hasil uji t dengan nilai signifikan sebesar $0,23 > 0,05$. Variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali tahun 2017-2020 tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali 2017-2020.

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen yang menggambarkan kinerja keuangan daerah serta menambahkan variabel independen yang baru kedalam penelitian sehingga hasil penelitian lebih bervariasi. Penelitian selanjutnya memperluas cakupan daerah penelitian menjadi seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Mencari alternatif sumber data penelitian lainnya, seperti melalui laman resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan melalui situs resmi pemerintah daerah terkait. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah cakupan tahun penelitian menjadi 5-6 tahun, sehingga hasil penelitian dapat merealisasikan kondisi pada keseluruhan pemerintahan di pulau jawa. Penelitian selanjutnya dapat memperbanyak jenis analisis pengukuran kinerja keuangan daerah. Sehingga dapat dijadikan sumber informasi pendukung bagi penelitian selanjutnya serta bagi masyarakat sebagai sumber informasi pendukung untuk memahami kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A`Alimatul Muflihatin. (2016). Pengaruh Opini Audit, Fungsi Pengawasan DPRD, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*.
- Achmad, A., Septiyanti, R., & Metalia, M. (2017). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, dan Hasil Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(1), 1–14.
- Alvini, Y. (2018). PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Periode 2011- 2016) Oleh. *JOM FEB*, 1, 1–15.

- Andriyani, E. (2018). PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH(Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah / Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2013-2016). *Skripsi*.
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Budiana, R., & Rahayu, S. (2021). *THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT REVENUE AND INTERGOVERNMENTAL REVENUE OF REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE (Case Study on Provincial Government In Indonesia In 2020)*. 8(6), 8368–8375.
- Cahyono, B. D. (2014). DI JAWA TIMUR IDENTIFICATION DEGREES OF FISCAL COMPETITION IN EAST. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 47–54.
- Dienti Laksmi Dewi. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Daeah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. *Skripsi*.
- Ditasari, R. A., & Sudrajat, M. A. (2020). Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. : : *Jurnal Akuntansi Vol.*, 4(2), 104–117.
- Hapsari, D. W. (2020). PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN OPINI AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2018) *THE INFLUENCE OF CAPITAL EXPENDITURE, LOCAL. E-Prceeding of Management*, 7(2), 2743–2750.
- Kanwil, K., Perbendaharaan, D., & Banten, P. (2020). *Kajian Fisikal Regional*.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (n.d.). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. *Skripsi*.
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi*, 14(1), 11–20.
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. made A. (2016). PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMAKMURAN, INTERGOVERNMENTAL REVENUE, TEMUAN DAN OPINI AUDIT BPK PADA KINERJA KEUANGAN. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.*, 1150–1182.
- Millenia, N. A. (2022). PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMAKMURAN DAN INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Nur. *Syntax Administration*, 3(6).
- Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda. (2019). *PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Ni*. 8(8), 4759–4787.
- Pratama, A. B., & Mawardi, M. C. (2022). PENGARUH OPINI AUDIT BPK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN INTERGOVERNMENTAL REVENUE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2019. *E-JRA*, 11(02), 25–34.

- Puspitasari, A., & Salisa, N. R. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Keresidenan Pati Tahun 2010-2016). *Accounting Global Journal*, 1(1), 30–41.
- Rahmawati, N. K. E., & Putra, I. W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(3), 1767–1795.
- Rahmawaty, R. A. dan. (2020a). PENGARUH KEMAKMURAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598.
- Rahmawaty, R. A. dan. (2020b). PENGARUH KEMAKMURAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, 040501*, 1–66.
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 43–53.
- Sedyaningsih, P. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2012). *Jurnal Akuntansi*, 73, 1–14.
- Setianingrum, R. D., & Haryanto. (2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI JAWA TENGAH Rizqi. *E-Jurnal UNDIP*, 9, 1–15.
- Suandani, P., Putu, I. G., & Astawa, B. (2021). Pengaruh Opini Audit , Belanja Modal , Pendapatan Asli Daerah , Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Ganesha*, 728–739.
- Sumarjo, H. (2010). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia). *Skripsi*.
- UU-HKPD:Redesign desentralisasi fiskal. (2022). No Title. *Artikel Ekonomi*. <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html>
- ZULFANNY GESTYAN PRADANA. (2022). DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019). *Skripsi*.
- Zulkarnain, Z. (2020). ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT. *Cakrawala Repositori IMWI*, 3(April), 61–74.